

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi dan Objek Penelitian

Deskripsi objek penelitian merupakan isu atau permasalahan yang akan dikaji dalam suatu penelitian, objek penelitian mencakup hubungan antara hasil penelitian dengan analisis yang akan ditulis. Peneliti akan memaparkan hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan judul skripsi yakni Open Rekrutmen dan Sistem Kaderisasi Partai Politik Islam Tingkat Lokal (Studi Komparasi Dewan Pimpinan Cabang PKB dan Dewan Pimpinan Daerah PKS Kabupaten Grobogan Tahun 2020-2021). Pada bab 4 ini peneliti akan menguraikan gambaran umum objek penelitian, data hasil penelitian, dan analisis hasil penelitian.

1. Gambaran Umum dan Visi Misi PKB

Secara historis setelah runtuhnya orde baru tahun 1998 merupakan langkah kelahiran Partai Kebangkitan Bangsa yang dimulai dari tuntutan warga NU atas reformasi di bidang politik dan penyaluran aspirasi politik kaum nahdliyyin secara bebas dan demokratis guna menghindari kerancuan antar partai sebagai wadah aspirasi politik warga NU¹. Melihat banyaknya dorongan untuk mendirikan partai baru, PB NU memutuskan membentuk tim 5 yang bertugas untuk menampung semua usulan warga NU untuk mendirikan partai baru. Melihat proses yang lama pada tanggal 23 Juli 1998 resmi didirikan partai baru yakni PKB di tempat Gusdur, Ciganjur Jakarta Selatan, PKB dilahirkan dari NU untuk bangsa Indonesia yang bercontoh pada Walisongo untuk membangun tatanan masyarakat dengan gerakan moral dan spiritual. PKB memiliki lingkungan kebudayaan dan keagamaan yang khas, dengan menjunjung nilai Islam Ahlussunnah Wal Jamaah. Setiap anggota dan aktivis partai baik perorangan/ kolektif harus konsisten dalam memperjuangkan kelestarian lingkungan kebudayaan dan nilai keagamaan tanpa menghindari perubahan sunnatullah². Dari segi nama PKB partai kebangkitan bangsa selalu lebih

¹ Ridho Al Hamdi, "*Partai Politik Islam Teori Dan Praktik*", (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), Hlm. 101.

² Musa Kazhim dan Alfian Hamzah, "*Lima Partai Dalam Timbangan PAN, PBB, PDI Perjuangan, PKB, PPP Analisis Dan Prospek*", (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), hlm, 249-250.

mengedepankan nilai-nilai kebangsaan Indonesia dibanding mendirikan negara islam/ menerapkan hukum-hukum islam secara formal. PKB memandang bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah final atas perjuangan Indonesia dirumuskan menjadi mabda siyasi atau titik tolak politik yang menerapkan nilai-nilai etika sosial islam dalam bernegara.

Sejak saat itu Partai Kebangkitan Bangsa menjadi partai yang berkembang di seluruh wilayah Indonesia, salah satunya di Kabupaten Grobogan yang terletak di kantor DPC PKB Kabupaten Grobogan Jalan Hayam Wuruk No.39 A, Rt 05/ Rw 15, Purwodadi, Jetis Timur, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Kode Pos 58111. terlepas dari sejarah PKB secara umum di kabupaten Grobogan PKB sendiri cukup mendominasi dengan perolehan suara 26.441 % dan mendapatkan 7 kursi calon legislatif³.

Adapun visi dari Partai Kebangkitan Bangsa adalah mewujudkan cita cita negara RI sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara lahir, batin, material dan spiritual, mewujudkan tatanan politik nasional yang demokratis, terbuka, bersih dan berakhlakul karimah. Adapun misi yang diusung PKB di berbagai bidang antara lain di bidang ekonomi: menegakkan dan mengembangkan kehidupan ekonomi kerakyatan yang adil dan demokratis. Di bidang hukum: berusaha menegakkan dan mengembangkan negara hukum yang beradab, mampu mengayomi seluruh rakyat, menjunjung tinggi HAM dan keadilan sosial. Di bidang sosial budaya: berusaha membangun budaya yang maju dan modern dengan tetap memelihara jati diri bangsa yang baik demi meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Di bidang pendidikan: berusaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia, mandiri, terampil, professional dan kritis terhadap lingkungan dan sekitarnya, mengusahakan terwujudnya sistem pendidikan nasional yang berorientasi kerakyatan, murah dan berkesinambungan. Di bidang pertahanan: membangun kesadaran setiap warga

³ Bawaslu Kabupaten Grobogan, “*Analisis Hasil Pengawasan Perolehan Kursi Partai Politik Dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Pemilihan Umum Tahun 2019*” diakses pada Senin 7 Maret 2022 pukul 21.00 WIB, <https://grobogan.bawaslu.go.id> .

negara terhadap kewajiban turut serta usaha pertahanan negara, mendorong terwujudnya swabela masyarakat atas perlakuan rasa tidak aman baik dari pribadi maupun institusi tertentu dalam masyarakat⁴.

Struktur Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Grobogan Periode 2021-2026⁵.

MUSTASYAR : KH. Abdul Munif Zuhri
 KH. Ali Mansyur
 KH. Chadziq
 KH. Drs Ahmad Hambali
 Mahfudz, M.Pd.I
 KH. Aflakhurroji, Lc
 KH. Muslih Umar, AH
 KH. Ahmad Dahlan
 KH. Zuhri Wafa, AH
 KH. Damyathi
 Nyai Hj. Asmaussa'adah, AH
 Hj. Laili Solihah Wahid
 Hj. Titik Diroyati.

DEWAN SYURO

Ketua : KH. Mussyafa'zain
Wakil Ketua : Ir. H.M Nurwibowo, M.SI
Wakil Ketua : Habib Ahmad Fadhil Azmat
 Khon
Wakil Ketua : KH. Zainal Arifin
Wakil Ketua : KH. Nur Misbah
Wakil Ketua : K.H Saifuddin Zuhri, BA
Wakil Ketua : Ummu Rohmah

SEKERTARIS

Wakil Sekertaris : K.M. Sya'roni Dimiyathi
Wakil Sekertaris :K.Muhammad
 Munawar,SPd.I
Wakil Sekertaris : K.Qoulan Abdullah
Wakil Sekertaris : Nyai Binti Muzayanah
Wakil Sekertaris : Nyai Ro'ifah
Wakil Sekertaris : Habib Hasyim

⁴ DPP PKB, *Ad/Art Partai Kebangkitan Bngsa*, ed. by Moch Bisri Muchlisin Erce, 1st edn (Jakarta Pusat: Sekertariat Jendral DPP PKB, 2014).

⁵ *Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Grobogan Periode Tahun 2021-2026*, Diakses Pada Hari Senin,14 Maret 2022.

Wakil Sekertaris : KH. Masruri, SPd.I
 ANGGOTA : KH. Shohanhaji
 K. Achmad Fadholi
 KH. Mujahid
 K. Syafruddin, AH
 Hj. Ma'sumah
 Nyai Siti Qomariyah
 Hj. Zamronah

DEWAN TAHFIDZ

Ketua : Musta'in, S.Ag
 Wakil Ketua : H. Sukanto, SH.MH
 Wakil Ketua : Nur Ali Mursidi, S.Ag, M.Si
 Wakil Ketua : H. Agus Dwi Priyanto, MM
 Wakil Ketua : Hj. Sri Murdiati, S.Ag
 Wakil Ketua : Siti Istiqomah, S.Ag
 Wakil Ketua : Rahmawati
 Wakil Ketua : Titik Sugiarti, SH, MH
 Wakil Ketua : Abdurrahman Wachid, SH
 Wakil Ketua : Ali Mursidi, S.Pd.I
 Wakil Ketua : Umi Khomsatun, S.Pd

SEKERTARIS

Wakil Sekertaris : Ir. H. Mukhlisin, MM, M.Si
 Wakil Sekertaris : H. Fathoni, S.Pd.I
 Wakil Sekertaris : Syaidun, S.Pd.I, MM
 Wakil Sekertaris : Abdul Syakur, M.Pd.I
 Wakil Sekertaris : M. Ali Irwan, SH
 Wakil Sekertaris : Maftuhah Faridha, SH
 Wakil Sekertaris : Binti Khoiriyah
 Wakil Sekertaris : Siti Nur Hayati
 Wakil Sekertaris : Ittaq Sabila
 Wakil Sekertaris : Milatul Azka

Wakil Sekertaris : Fachri Sakti Nugroho, S.Kom
BENDAHARA : Mansata Indah Maratona, M.Si

Wakil Bendahara : Winarti
 Wakil Bendahara : Hj. Eny Winiharti, SH
 Wakil Bendahara : Umi Mubarakah, S.Pd.I
 Wakil Bendahara : Farikhah
 Wakil Bendahara : Umaroh
 Wakil Bendahara : Sri Utari, S.Pd.I
 Wakil Bendahara : Tri Anjani, S.Pd
 Wakil Bendahara : Didik
 Wakil Bendahara : Lutfil Hakim

Wakil Bendahara : Ahsin Shoifi

2. **Gambaran Umum & Visi Misi PKS**

Sejarah berdirinya partai PKS tidak lepas dari tahun 1980 dimana awal mula pertumbuhan aktivitas dakwah islam, partai PKS sebagai kelanjutan PK partai keadilan berlambangkan dua bulan sabit yang berdiri pada 20 Juli tahun 1998. PK muncul ketika tahun 1980an di Indonesia sempat muncul gerakan islam yang menguasai beberapa masjid salah satunya masjid kampus sebagai langkah awal pusat gerakan, seiring berjalannya waktu gerakan tersebut semakin berkembang pesat di berbagai daerah bisa dikatakan gerakan tersebut seperti tabligh akbar, seminar aktivitas sosial, pendidikan dan lain lain. Pada masa orde baru ketika Soeharto turun dari jabatannya 21 Mei 1998 kalangan aktivis dakwah islam mulai menyebar dan mendirikan partai politik yang bernama PKS berpedoman ajaran islam demokratis mewujudkan bangsa dan negara atas ridha Allah. Kesepakatan atas partai politik tersebut diadakan di masjid kampus di Indonesia, tak heran jika anggota PKS dominan dari intelektual kaum pemuda islam kampus, secara resmi PKS dikukuhkan pada tanggal 18 Maret 2003 melalui akta notaris.

Salah satu dari penelitian penulis di Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Grobogan, PKS cukup dikenal sebagai partai yang memiliki AD/ART yang terstruktur, dan di Kabupaten Grobogan pada pilkada 2019 lalu PKS mendapatkan perolehan suara 11.720 % dengan jumlah 2 kursi legislatif, kantor Dewan Pimpinan Daerah PKS Kabupaten Grobogan terletak di Jalan. Gang. Kendeng, RT.01/ RW. 18, Simpang Utara, Kecamatan. Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah Kode Pos 58111.

PKS memiliki visi dan misi berasaskan islam dengan visi PKS adalah menjadi partai pelopor dalam mewujudkan cita cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan terwujudnya masyarakat madani yang adil, sejahtera, dan bermartabat. Sedangkan misi dari PKS adalah menjadikan partai sebagai sarana perwujudan masyarakat madani yang adil, sejahtera dan

bermartabat dalam keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila⁶. Ada 3 hal pokok yakni mempelapori reformasi sistem politik, pemerintah, birokrasi, peradilan, militer untuk berkomitmen dalam penguatan demokrasi. Kedua mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat dengan strategi pemerataan pendapatan, pertumbuhan bernilai tambah tinggi dan pembangunan berkelanjutan yang dilaksanakan melalui pelipatgandaan produktivitas sector pertanian, kehutanan, kelautan, peningkatan pembangunan sector yang menjadi sumber pertumbuhan baru berbasis sumberdaya dan pengetahuan. Ketiga, menuju pendidikan yang berkeadilan dengan membuka kesempatan pada seluruh rakyat Indonesia⁷.

Susunan Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Grobogan Masa Bakti 2020-2025⁸.

MAJELIS PERTIMBANGAN DAERAH

Ketua : Ahmad Sidik, S.Pd, M.Pd

Sekertaris : Hari Mulyo

DEWAN PENGURUS DAERAH

Ketua : Suranto, S.Pd

Sekertaris : Nur Edy

Bendahara : Ahmad Syarif, S.T

Ketua Bidang Kaderisasi : Kasharnowo, SE

Sekertaris & Biro Data Perencanaan

: Sigit Nugroho, S.Pd, M.Kim

Biro Keanggotaan & Kurikulum

: Riska Ajibudiarta, S.Pd

Biro Pelatihan

: Muh Suwanto, S.Pd

Ketua Bidang Perempuan & Ketahanan

: Tri Adhadiningsih, S.Sos

Keluarga

Sekertaris Bidang Perempuan &

: Ari Mami, S.Pd, Si

⁶ *Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan Sejahtera 1442 H/ 2021 M* (Jakarta Selatan: Sekertariat Jendral DPP PKS, 2021).

⁷ Ridho Al Hamdi, "*Partai Politik Islam Teori Dan Praktik*", (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), Hlm. 100.

⁸ *Susunan Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Grobogan Masa Bakti 2020-2025*, Diakses Pada Sabtu, 19 Maret 2022, Pukul 16:50 WIB, Di Kantor DPC PKS Kabupaten Grobogan.

Ketahanan Keluarga

ANGGOTA

1 : Dr, Dini Pangestika

2 : Siti Kholifah, M.Pd

Ketua Bidang Kepanduan

: Mustarom, S.Pd.I

Ketua Bidang Kepemudaan

: Wahyu Lestari Wijayanto, A.Md

Ketua Bidang Humas

: Kristiono, S.Ip

Ketua Bapilu

: M.A Amin Rois Abdul Ghoni, S.E

Ketua Bidang Hukum, Kebijakan Publik

: Imam Suranto

Dan Ketenagakerjaan

Ketua Bidang Pembinaan Desa,

: Ilham Pradigda Mengku. S.TP

Petani Dan Nelayan

Ketua Bidang Pembinaan Cabang

: Kasharnowo, S.E

DEWAN ETIK DAERAH

Ketua

: Widiyanto, SE

Struktur dan visi misi Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Keadilan Sejahtera diatas ditulis untuk menjawab teori dan hasil analisis sistem kaderisasi yang ideal di Indonesia, keduanya akan dibutuhkan salah satunya dengan adanya divisi kaderisasi yang bertanggung jawab dalam pendidikan politik. Hal tersebut akan terjawab apakah kedua partai tersebut sudah ideal dalam sistem kaderisasi di Indonesia.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Rekrutmen Politik Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Grobogan dan Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Grobogan Tahun 2020-2021.

a) Partai Kebangkitan Bangsa

Seperti yang telah dijelaskan bahwasannya rekrutmen sebagai proses setiap individu atau kelompok yang dimana dilibatkan dalam proses peran politik aktif, dalam konteks politik proses rekrutmen menunjuk pada seleksi terhadap para kandidat dalam tingkat eksekutif

maupun legislatif. Pada seleksi kandidat nantinya akan menentukan siapa caleg atau wakil rakyat yang layak diajakukan dalam pemilihan dan juga memerintah.

Penulis menggunakan teori Skema Model Rekrutmen dari Pippa Norris bahwasannya proses rekrutmen politik itu ada 3 tahapan yakni sertifikasi, nominasi dan tahap pemilu. Pada tahapan pertama sertifikasi merupakan tahapan awal dari pendefinisian proses rekrutmen yang biasanya mencakup kriteria yang ditujukan dari aturan diinternal partai, aturan dalam pemilihan dan norma norma sosial informal lainnya. Kedua yakni tahapan nominasi yang dimaksud adalah nomnasi berkaitan dengan kesediaan caleg (kader partai) yang telah memenuhi syarat dan permintaan dari penyeleksi saat memutuskan siapa yang layak dinominasikan dari posisi yang akan diisi⁹. Dan yang terakhir tahapan pemilu atau proses pemilihan yang berkaitan dengan bagaimana cara memilih kandidat, siapa yang dilibatkan dalam proses pemilihan, bagaimana cara dalam menentukan siapa yang akan terpilih¹⁰.

Model skema tersebut menggambarkan faktor utama yang mempengaruhi proses rekrutmen politik dalam tahapan pencalonan dan pemilu, dalam hal ini penulis telah mendapatkan informasi mengenai proses rekrutmen politik pada Partai Kebangkitan Bangsa. Sesuai informasi yang telah didapat dalam tahapan proses rekrutmen politik Partai Kebangkitan Bangsa melewati tiga tahapan, pada tahapan pertama adalah sertifikasi. Menurut narasumber Ketua DPPC PKB H.Musta'in bahwasannya,

“Proses rekrutmen politik ada 3 tahapan yakni tahapan sertifikasi/ penjaringan seperti tahapan, aturan yang ada di hukum pemilu seperti aturan di

⁹ Sigit Pamungkas, *“Partai Politik Teori Dan Praktik Di Indonesia”*,(Yogyakarta: Institute For Democracy And Welfarism (IDW), 2011), Hlm. 90-108.

¹⁰ Syamsudin Haris dkk, *Panduan Rekrutmen & Kaderisasi Partai Politik Ideal Di Indonesia*, ed. by Bhakti Ikrar Nusa dan Nurhasim Moch, *Panduan Rekrutmen & Kaderisasi Partai Politik Ideal Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputusan Pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi Bekerja sama dengan Pusat penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik LIPI), 2016). Hlm.10

PKB dan norma yang sifatnya informal dalam menentukan kriteria kandidat untuk dicalonkan menduduki lembaga legislatif. Kedua tahap nominasi/ penyaringan seperti ketersediaan calon untuk dinominasikan dan tentunya melalui proses dimana diseleksi, siapa yang dicalonkan di pemilihan. Kemudian yang terakhir tahapan pemilihan yang merupakan langkah terakhir para calon atau para kandidat itu diputuskan¹¹.”

Dalam tahapan sertifikasi ada beberapa kriteria yang dikehendaki di Partai Kebangkitan Bangsa dalam konteks tertentu yang secara umum berkaitan dengan ideologi di PKB, loyalitas terhadap PKB, dukungan politik, kemampuannya dalam berpolitik, rekam jejak atau latar belakang calon dan lain lain. Di PKB tentunya terdapat kriteria dalam menentukan kandidat antara lain: *Pertama*, kader atau kandidat tersebut diutamakan prioritasnya dari kader NU dan tidak serta merta mereka yang mampu secara financial namun bukan dari kader NU dan belum siap memperjuangkan NU tentunya akan dipertimbangkan karena pada dasarnya PKB tujuannya membesarkan NU. *Kedua* adalah kriteria pendidikan minimal berijazah SMA baik dari anggota DPRD maupun pengurus partai. *Ketiga*, memiliki kemampuan, kompetensi, rekam jejak yang baik, tidak berstatus pidana, aktif, loyalitas terhadap partai, nilai/ sekor terhadap potensi elektabilitasnya seperti apakah calon tersebut pernah menjadi pengurus atau menduduki jabatan politik tertentu. *Keempat*, diusahakan caleg tersebut bertenpat tinggal di daerah pemilihan karena tentunya calon tersebut memiliki pengetahuan mengenai aspirasi masyarakat terhadap daerah pemilihannya yang rendah.

Setelah semua calon berhasil di kumpulkan sesuai kriteria secara kelayakan, prosedur selanjutnya semua calon anggota, calon kader, calon anggota legislatif mengikuti uji kelayakan dan kepatutan/ proper test dimana seseorang dianggap layak dan

¹¹ Mustain, Selaku Ketua DPC PKB Kabupaten Grobogan, Wawancara Dengan Penulis Pada Hari Rabu, 02 Maret 2022, Pukul 13:23 Wib, Di Kantor DPC PKB Kabupaten Grobogan, Wawancara 1, Transkrip.

patut menduduki jabatan tertentu dengan bagaimana kesiapan dirinya dalam menduduki jabatan pemerintah yang pastinya ketika sudah dicantumkan dan masuk dalam nominasi anggota atau caleg diharuskan mengikuti prosedur yang sudah ditentukan, seperti menjadi anggota calon legislatif tidak sedang berstatus PNS, pejabat pemerintahan sesuai dengan aturan KPU. Kemudian prosedur terakhir kesanggupan para caleg mengikuti tata aturan, tahapan yang berlaku sesuai yang telah diselenggarakan PKB karena tahapan tersebut akan tatap terus berjalan.

“Tahap sertifikasi kriterianya bakal calon legislatif PKB diutamakan prioritasnya adalah kader NU yang artinya tidak serta merta parameternya berdasarkan financial/ mampu tapi bukan kader NU dan tidak siap memperjuangkan NU tentu dipertimbangkan karena PKB tujuannya membesarkan NU, kriteria pendidikan minimal SMA termasuk yang terendah anggota DPRD dan lain lain. Kemudian setelah kriteria selesai fit and proper semua calon anggota, calon kader, calon anggota legislatif mengikuti proper test bagaimana kesiapan dirinya ketikasudah namanya dicantumkan dalam nominasi anggota atau caleg itu dia harus lepas semua tidak boleh ada yang masih melekat menjadi PNS, pejabat pemerintahan, karena itu termasuk dalam prasyarat ketika orang itu diajukan ke KPU. Kemudian finallynya adalah kesanggupan mengikuti tata aturan, tata tahapan yang diselenggarakan PKB harus patuh pada aturan yang berlaku karena tahapan tersebut terus berjalan dan orang yang mendaftar juga harus mengikuti tahapan yang dilakukan oleh partai¹².”

Jadi kandidat yang layak untuk dinominasikan mengikuti pemilihan menjadi calon legislatif fraksi PKB Kabupaten Grobogan mereka yang terpilih sesuai kriteria dan prosedur sesuai AD/ART Partai Kebangkitan Bangsa, seperti yang telah ditentukan

¹² Mustain, Selaku Ketua DPC PKB Kabupaten Grobogan, Wawancara Dengan Penulis Pada Hari Rabu, 02 Maret 2022, Pukul 13:23 Wib, Di Kantor DPC PKB Kabupaten Grobogan, Wawancara 1, Transkrip.

diatas, mereka para kader/ caleg yang memiliki kriteria yang sudah dipertimbangkan untuk kebutuhan partai dan tentunya mereka yang telah memiliki tanggung jawab besar terhadap partai untuk menjadi wakil rakyat dan pejabat publik yang telah terpilih sesuai kriteria dan integritas dalam mewakili aspirasi dan keinginan masyarakat.

Proses rekrutmen politik selanjutnya adalah tahapan nominasi yang secara keseluruhan rekrutmen politik berhubungan dengan bagaimana partai politik mengorganisasikan diri, yang meliputi 4 hal penting antara lain siapa yang menyeleksi, dimana para kandidat diseleksi, bagaimana metode seleksi yang dilakukan dan bagaimana para kandidat tersebut diputuskan¹³. Untuk yang pertama siapa yang menyeleksi para kandidat tersebut, di PKB yang melakukan penyeleksi para kandidat adalah ketua DPC PKB Kabupaten Grobogan H.Musta'in dibantu dengan jajaran pengurus Dewan Syuro/ Tim Mantap meliputi Ketua Dewan Syuro, Sekertaris Dewan Syuro, Ketua Dewan Tanfidz, Sekertaris Dewan Tahfidz, Ketua Dewan Pertimbangan Unsure Perempuan yaitu Ketua Perempuan Bangsa. Ketika sudah terkumpul nama kader yang telah disetujui maka para kader tersebut sudah layak dan lolos untuk dimasukkan dalam daftar pencalonan anggota legislatif untuk disetorkan di KPU. Tim Mantap PKB tersebut juga termasuk dalam pembuatan dan mengatur nomor urut di pencalonan mengapa terdiri dari 5 orang, karena 5 orang tersebut dapat mewakili ketika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan seperti adanya deadlock (permintaan yang saling tunggu menunggu) dan mengharuskan voting. Jadi tim mantap di PKB sangat penting dalam hal menyeleksi.

“Yang menyeleksi utama adalah ketua DPC PKB jadi domain dari semua itu adalah ketua DPC PKB yang dibantu oleh jajaran pengurus Dewan Syuro yaitu ketua dewan syuro, sekertaris dewan syuro, ketua dewan tanfidz, sekertaris dewan tanfidz, ketua

¹³ Ridho Al Hamdi, *“Partai Politik Islam Teori Dan Praktik”*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), Hlm. 93

dewan pertimbangan dari satu unsure perempuan yakni ketua perempuan bangsa. Ketika sudah ditentukan nama yang telah disetujui maka kader sudah layak dan lolos untuk dimasukkan dalam daftar calon anggota legislatif yang kita setorkan ke KPU termasuk yang mengatur juga nomor urut dan menentukan di pencalonan adalah tim mantap yang terdiri dari 5 orang diatas, kenapa harus 5 orang, karena ketika terjadi suatu hal dan mengharuskan voting tidak akan terjadi deadlock¹⁴”.

Selanjutnya metode seleksi untuk menominasikan bakal calon legislatif adalah menggunakan metode seleksi wawancara dan yang diutamakan tentunya semacam sekor/ point tertentu apakah kader atau bakal caleg tersebut pernah menjabat sebagai apa di PKB ataupun lainnya, metode yang digunakan hanya wawancara karena dalam menjangkau kader untuk dijadikan bakal caleg karena itu bagian dari kebutuhan partai. Jadi mekanismenya dari PKB membuat formulir pengumuman baik di media sosial seperti di media WA Grup NU dan komunitas lainnya, dari DPC PKB mensosialisasikan tentang perekrutan bakal calon legislatif dengan cara mereka datang di kantor DPC PKB dan siap memiliki kriteria dan mengikuti prosedur sesuai aturan partai, sosialisasi perekrutan tersebut notabennya dilakukan kepada internal partai akan tetapi perekrutan di PKB juga diperbolehkan dari eksternal partai yang telah memenuhi kriteria kandidasi dari aturan partai PKB dan pastinya bakal calon legislatif tersebut mampu/sanggup secara financial.

“Metode seleksi yang digunakan kita adalah wawancara, sekor/ point dia pernah menjabat sebagai apa di PKB, dan juga kriteria yang telah diumumkan partai. Setelah wawancara tidak ada tes lain karena sistem dipartai itu partai yang butuh. Kita membuat formulir dan pengumuman di medsos melalui grup WA, komunitas NU dan sebagainya, jadi kita mensosialisasikan tentang perekrutan dan

¹⁴ Mansata Indah Maratona, Selaku Bendahara DPC PKB, Wawancara Dengan Penulis, Pada Hari Rabu, 02 Maret 2022, Pukul 13:14 WIB, Di Kantor DPC PKB Kabupaten Grobogan, Wawancara 2, Transkrip.

endingnya kita wawancarai mereka, mereka datang dan berminat kita terima dan wawancarai. Perekrutan tersebut secara internal partai namun juga diperbolehkan dari eksternal partai yang telah memenuhi kriteria PKB dan secara financialnya mampu¹⁵”.

Kemudian para kandidat tersebut di seleksi di kantor DPC PKB karena di DPC PKB adalah pusat dari sumber informasi dan kerja partai. Dan para kandidat tersebut diputuskan sesuai dengan keputusan Ketua DPC PKB melalui Tim Mantap Ketua dewan syuro, sekretaris dewan syuro, ketua dewan tanfidz, sekretaris dewan tanfidz, satu unsure pembina perempuan. Ketika sudah berproses, disetujui dan ditentukan oleh tim mantap yang semuanya tidak melibatkan pengurus PKB, karena jika melibatkan semua pengurus PKB akan menghambat proses penentuan kandidat karena notabennya jumlah pengurus PKB ada 60 orang. Tim Mantap yang terdiri dari 5 orang tersebut sudah dianggap mewakili keseluruhan jumlah pengurus partai PKB.

“Seleksi dilakukan di kantor DPC PKB, terpusat disini karena sumber informasi, kerja partai itu pusatnya di kantor DPC PKB. Dan untuk kandidat diputuskan kembali lagi melalui tim mantap, ketika sudah berproses ini bagaimana disetujui dan ditetapkan oleh tim mantap dan tidak melibatkan semua pengurus PKB, karena jumlah pengurus PKB total 60 jikalau melibatkan 60 orang itu bisa memakan waktu lama maka unsure 5orang tersebut sudah mewakili yaitu unsure suro unsure tanfid dan unsure perempuan. Suro kalau penjabarannya adalah peminanya atau kyainya PKB kalau di NU suriah¹⁶”.

¹⁵ Mansata Indah Maratona , Selaku Bendahara DPC PKB, Wawancara Dengan Penulis, Pada Hari Rabu, 02 Maret 2022, Pukul 13:14 WIB, Di Kantor DPC PKB Kabupaten Grobogan, Wawancara 2,Transkrip.

¹⁶ Mustain, Selaku Ketua DPC PKB Kabupaten Grobogan, Wawancara Dengan Penulis Pada Hari Rabu, 02 Maret 2022, Pukul 13:23 Wib, Di Kantor DPC PKB Kabupaten Grobogan, Wawancara 1,Transkrip.

b) Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Grobogan

Dengan menggunakan model teori rekrutmen politik Pippa Norris sesuai dengan 3 tahapan Sertifikasi, Nominasi dan Pemilu. Untuk tahapan sertifikasi menurut narasumber Suranto, S.Pd selaku ketua DPD PKS Kabupaten Grobogan kriteria dan prosedur untuk menjadi calon legislatif adalah sesuai undang undang pemilu dan AD/ART PKS yang telah ditentukan. Mereka atau kader yang berkebangsaan WNI, berkewarganegaraan Indonesia, bersedia mengikuti dan menjalankan AD/ART partai, walaupun PKS adalah partai islam namun PKS tidak membatasi individu yang berbeda agama untuk masuk partai maupun para pejabat publik yang ingin menduduki pemerintahan, karena PKS membuka ruang untuk semua orang yang berbeda agama sebagai bentuk usaha mempererat persatuan bangsa tanpa membedakan ras/ agama, kriteria selanjutnya para pengurus partai dan yang menjadi bakal calon legislatif maupun pejabat publik tidak pernah tersangkut atau terlibat narkoba dan pelanggaran sosial lainnya, memiliki kemampuan dan pengetahuan yang luas baik agama ataupun pemerintahan dan lain lain sesuai dengan AD/ART dan undang undang ketentuan pemilu, diharapkan para bakal caleg berdomisili sesuai dengan wilayah pemilihan. Di partai PKS yang paling utama untuk menjadi anggota partai, pengurus partai, calon legislatif atau pejabat publik kader wajib mengikuti dan melewati penjurangan keanggotaan mulai dari anggota pendukung (pemula, siaga), anggota penggerak (muda, pratama), anggota pelopor (madya, dewasa, utama). Jika tidak melewati atau tidak mengikuti jenjang pengkaderan maka caleg tersebut tidak dapat naik ke jenjang karir sebagai pengurus atau pejabat publik, karena menjadi pemimpin harus memiliki loyalitas dan kemampuan yang tinggi.

“Secara umum kriteria para kandidat dari PKS itu sendiri mengaju pada AD/ARTnya seperti mereka para calon legislatif akan melalui proses pepenjaringan dan penyaringan, penetapan sesuai dengan mekanisme demokratis atau terbuka. Untuk menjadi bakal calon legislatif fraksi PKS yang pastinya berkebangsaan WNI, berkewarganegaraan

Indonesia, harus siap mengikuti dan siap menjalankan AD/ART partai, tidak harus beragama islam karena PKS membuka ruang untuk semua yang berbeda agama bergabung menjadi anggota partai, pengurus partai dan menjadi bakal calon legislatif maupun pejabat publik, tidak pernah tersangkut atau terlibat narkoba, pelanggaran sosial lainnya dan pastinya harus memiliki pengetahuan yang luas dan lain lain sesuai dengan AD/ART dan undang undang ketentuan pemilu. Di PKS utamanya untuk menjadi anggota partai, pengurus partai, calon legislatif atau pejabat publik harus melewati penjurangan keanggotaan mulai dari anggota pendukung (pemula, siaga), anggota penggerak (muda, pratama), anggota pelopor (madya, dewasa, utama)¹⁷.”

Pada tahapan sertifikasi untuk masuk ke tahap nominasi, Kemudian bakal calon legislatif dari fraksi PKS tersebut diseleksi oleh tim panjatida (panitia penjurangan mutiara daerah)/ pansel (panitia seleksi) dengan menggunakan metode seleksi wawancara yang bertempat di kantor DPD PKS.

“Kalau di PKS ada namanya tim Pansel panitia seleksi dahulunya itu bernama Panjatida (Panitia Penjurangan Mutiara Daerah), dari tim PKS Grobogan setiap 5 tahun mereka menyeleksi bakal caleg yang mendaftar di PKS, namun untuk di tahun 2024 mendatang kurang lebih ada pembaharuan yang melibatkan lembaga eksternal untuk terlibat dalam proses penyaringan/ nominasi sesuai kesepakatan dari Rakernas dan Rakerwil. Untuk metode seleksi sendiri menggunakan wawancara dll yang dilakukan di kantor PKS.”

Setelah melewati prosedur dan metode seleksi yang sudah dilakukan para kandidat bakal calon legislatif diputuskan oleh Tim Panjatida serta pemberian nomor urut pada bakal calon legislatif tersebut. partai PKS menerima siapapun baik mereka yang memiliki

¹⁷ Suranto, Selaku Ketua DPD PKS Kabupaten Grobogan, Wawancara Dengan Penulis, Pada Hari Jumat, 04 Maret 2022, Pukul 13:14 WIB, Di Kediaman Tanggunharjo Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, Wawancara 4, Transkrip.

tracks moral atau kasus lain asalkan mengikuti perjenjangan keanggotaan sesuai AD/ART PKS¹⁸.

“Para kandidat itu diputuskan menjadi caleg, dari PKS tidak ada dalam kata menolak, ketika caleg itu punya tracks moral atau terkait dengan kasus yang lain, secara umum dari PKS jarang menolak para caleg yang mendaftar karena mencari seorang calon legislative pun tidaklah mudah. Melihat potensi terkait itu juga nantinya berkesinambungan dengan adanya nomor urut perdapil terkait dengan kapasitasnya caleg layak dimasukkan di nomor urut. Meskipun di sistem pemilu Indonesia terbuka tidak berdasarkan nomor urut tapi bagi calon legislatif nomor urut itu penting, jadi dengan adanya metode seleksi wawancara itu kemudian akan mengetahui caleg ini di nomer urut berapa¹⁹.”

2. Sistem Kaderisasi Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Grobogan Tahun 2020-2021

Dalam kelanjutan rekrutmen politik juga dilihat dari sistem kaderisasi partai yang diterapkan, kaderisasi di partai politik sangat berpengaruh terhadap kualitas SDM (sumber daya manusia) yang nantinya menjadi kesempatan untuk menjadi kandidat pejabat publik. Kaderisasi menjadi aspek penting dalam partai politik maupun organisasi, kaderisasi partai tergantung pada kemampuan partai memodifikasi nilai, aturan internal kaderisasi tentang jenjang pengkaderan. Pengertian dari kader partai adalah individu yang sudah direkrut menjadi anggota partai, kemudian kader tersebut diberikan pembinaan tentang partai sampai pada tahapan kualitas kader tersebut diuji dan dinilai diranah publik²⁰.

¹⁸ *Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan Sejahtera 1442 H/ 2021 M* (Jakarta Selatan: Sekretariat Jendral DPP PKS, 2021).

¹⁹ Suranto, Selaku Ketua DPD PKS Kabupaten Grobogan, Wawancara Dengan Penulis, Pada Hari Jumat, 04 Maret 2022, Pukul 13:14 WIB, Di Kediaman Tanggunharjo Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, Wawancara 4, Transkrip.

²⁰ Syamsudin Haris dkk, *Panduan Rekrutmen & Kaderisasi Partai Politik Ideal Di Indonesia*, ed. by Bhakti Ikrar Nusa dan Nurhasim Moch, *Panduan Rekrutmen & Kaderisasi Partai Politik Ideal Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedepujian Pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi Bekerja sama dengan Pusat penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik LIPI), 2016). Hlm. 34.

Kaderisasi bersifat internal dari partai politik sebagai bentuk meningkatkan kemampuan individu anggota kader partai untuk menduduki jabatan dan menjalankan pemerintahan. Agar proses kaderisasi berjalan dengan baik maka perlu adanya sistem kaderisasi yang baku, berjenjang, dan memiliki prinsip kaderisasi, ada 4 hal indikator sebuah partai politik melakukan kaderisasi atau tidak yakni adanya kurikulum atau silabus kaderisasi, adanya divisi penanggung jawab kaderisasi, adanya rentang waktu/ level kaderisasi, output dari kaderisasi.

a. Kaderisasi PKB Kabupaten Grobogan

Partai PKB dalam mencetak kader pemimpin mereka yang memiliki integritas dan berwawasan luas dalam hal keagamaan dan pemerintahan, dalam perekrutan kader PKB menyesuaikan era globalisasi saat ini dengan proses kaderisasi bersifat terbuka untuk semua anggota partai maupun non partai yang telah mendaftar di PKB. dan bersifat relatif membuka ruang yang sama untuk anggota partai dalam hal karir politik, artinya ketika seorang kader yang serius menjalani dan menekuni semua kegiatan partai, maka kader tersebut akan mendapatkan suatu jabatan baik menjadi pengurus partai atau lainnya.

“Proses kaderisasi PKB bersifat terbuka, diumumkan di media sosial, partai mengikuti era milenial dan era gobalisasi yang sekarang sebagai era keterbukaan teknologi lebih mencondongkan ke publikasi yang murah lewat media sosial”. “Tahapannya ketika seseorang tersebut mendapatkan informasi, dia berminat, dan datang ke kantor PKB kemudian dia menawarkan diri untuk direkrut, maka setelah itu proses seleksi kaderisasi mulai dilakukan. Para calon kader partai dihubungi untuk mengikuti pelatihan, penyuluhan hukum, sosialisasi, pendidikan politik selanjutnya ke jenjang yang lebih serius di tahap rekrutmen”. Dan membuka peluang besar dalam karir politik, yang menentukan adalah seleksi alam dimana kader partai hanya tergantung pada keseriusan individu masing masing. Ketika mereka mengucapkan keseriusannya maka harus siap dengan segala konsekuensi seperti faktor bgaimana dia bekerja

penuh terhadap partai mulai dari turun kelapangan turun kebawah menyapa lapisan masyarakat dan rajin menyapa konstituennya dengan bonus mencoba mendapatkan suara terbanyak dari masyarakat dan berjaya di karir politiknya tentunya untuk mendapatkan itu membutuhkan biaya. Di PKB tidak menjamin bagaimana tentang pembiayaan namun kita saling gotong royong untuk meringankan kinerja calon legislatif tersebut²¹”.

Setelah menjadi anggota partai, PKB melakukan pendidikan politik dan pembinaan kader sebagai bentuk penambahan wawasan politik dan pemerintahan, namun belum dikatakan jelas adanya jenjang kaderisasi PKB. Namun kaderisasi PKB membawahi naungan organisasi sayap partai secara berjenjang mulai dari kader Gemasaba yang berisi mahasiswa, kader Garda Bangsa untuk kaum pemuda, dan Perempuan Bangsa dari wanita PKB. Untuk menjadi anggota sayap partai ada 2 pilihan memilih menjadi politik praktis (sudah berani ke jenjang mencalonkan diri anggota legislatif) atau sebagai simpatisan (seseorang yang mendukung) tapi kalau politik praktis langsung.

“Kaderisasi dilakukan mulai dari kader tingkat muda namanya kader garda bangsa segmennya adalah pemuda, lebih bawah lagi ada namanya gemasaba gerakan mahasiswa satu bangsa yang mewadahi para namanya garda bangsa. Kemudian di kalangan perempuan namanya perempuan bangsa segmennya hanya wanita di PKB memberikan wadah para perempuan belajar politik. Setelah mereka datang dan terolah mereka yakin maka disitu mereka akan menentukan pilihan lanjut atau tidak ke jenjang selanjutnya yakni di politik praktis atau sebagai simpatisan (seseorang yang mendukung) tapi kalau politik praktis langsung sudah berani ke jenjang mencalonkan diri ke anggota legislatif. Karena semua pasti ada konsekuensinya yang berbagai macam”.

²¹Fathoni, Selaku Ketua Bidang Divisi Kaderisasi DPC PKB Kabupaten Grobogan, Wawancara Dengan Penulis, Pada Hari Rabu, 02 Maret 2022, Pukul 14:02 WIB, Di Kantor DPC PKB Kabupaten Grobogan, Wawancara 3, Transkrip.

Kemudian yang bertanggung jawab dalam proses kaderisasi adalah divisi kaderisasi yang secara signifikan terdapat 2 divisi yang bertanggung jawab dalam kaderisasi, dan pemilihan. Untuk menjadi pengurus partai seperti divisi kaderisasi dan pemilihan para kader harus mengikuti Pendidikan Kader Pertama PKB yang merupakan syarat wajib dalam menyeleksi anggota maupun pengurus lainnya.

“Secara signifikan ada 2 divisi yang bertanggungjawab yakni divisi kaderisasi, dan divisi pemilihan, divisi kaderisasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan kaderisasi seperti kaderisasi formal di PKB setiap orang yang mau menjadi pengurus partai itu wajib hukumnya mengikuti PKP Pendidikan Kader Pertama PKB seperti mendapatkan pembinaan dari instruktur kabupaten, instruktur wilayah, dan struktur pusat jadi pada pelatihan kaderisasi berlangsung satu hari dengan menterinya berisi doktrinasi bagaimana seluk beluk partai kebangkitan bangsa seperti apa, visi misinya bagaimana, arah dan tujuannya bagaimana, sejarahnya bagaimana itu kita diatur semua di PKP PKB²²”.

Di sistem kaderisasi PKB tidak ada rentang waktu selama proses kaderisasi berlangsung, ketika kader yang baru aktif dalam kegiatan dan aktifitas partai maka diperbolehkan menduduki jabatan yang meskipun harus mengeluarkan banyak biaya yang cukup sesuai mereka akan mendapatkan karir politik secara bertingkat mulai dari pengurus sampai bakal calon legislatif.

“Tidak ada rentang waktu dari kaderisasi, seseorang yang baru bisa cepat karir politiknya jikalau memang kader tersebut serius dan bersungguh sungguh dalam kegiatan partai. Akan tetapi banyak sebagian yang hanya menjadi simpatisan partai tidak mau naik karena konsekuensinya dalam menduduki jabatan banyak membutuhkan mengeluarkan banyak biaya di partai.

²²Fathoni, Selaku Ketua Bidang Divisi Kaderisasi DPC PKB Kabupaten Grobogan, Wawancara Dengan Penulis, Pada Hari Rabu, 02 Maret 2022, Pukul 14:02 WIB, Di Kantor DPC PKB Kabupaten Grobogan, Wawancara 3, Transkrip.

Maka dari itu rentan waktu tidak dapat menjamin, contoh misalnya kader ini sudah menjadi kader partai sejak tahun berapa dan sekarang menjadi apa tidak bisa karena tidak ada yang mengatur soal itu. Hal tersebut tergantung pada diri masing masing aktif dan juga kemauannya untuk berani melangkah ke jenjang serius karena serius juga tidak akan lepas dari biaya”.

Selama proses mekanisme kaderisasi baik pendidikan, pembinaan, pelatihan yang sudah dilewati output yang didasarkan secara keseluruhannya adalah politik kehadiran dalam kegiatan pemerintahan atau lainnya sebagai bentuk tambahan poin keaktifan di PKB, dan dilingkungan masyarakat sebagai usaha untuk memperoleh suara rakyat dalam pemilihan.

“Outputnya PKB menyerukan untuk politik kehadiran dia harus ada disetiap momen apapun yang berada di wilayahnya, sebagai contoh diwilayahnya ada momen pilkades dia harus mewarnai momen atau hadir disetiap acara. Maka dari itu output tersebut masyarakat akan tahu dan mengerti bahwa PKB disetiap momen apapun ada dan hadir, jadi keaktifan kader PKB sangat menunjang bagaimana masyarakat menilai dan menyorot PKB itu wajah partainya seperti apa, pola gerakannya seperti apa, dan harapan utamanya adalah politik kehadiran disetiap momen dilingkungan masyarakat²³.”

b. Sistem Kaderisasi Partai Keadilan Sejahtera

Asas partai PKS adalah Islam rahmatan lil alamin anggota PKS tidak harus beragama Islam, karena PKS membaur disemua kalangan meskipun PKS adalah partai Islam namun terbuka untuk semua yang beragama apapun. Sejak dari dulu partai PKS menyesuaikan wilayah yang basisnya sesuai agama yang dianut dan bersifat inklusif terbuka dengan siapapun baik dari suku agama apapun.

“PKS merupakan partai terbuka karena PKS bersifat nasional religious membuka dari berbagai

²³ Fathoni, S.Pd.I Selaku Ketua Bidang Divisi Kaderisasi DPC PKB Kabupaten Grobogan, Wawancara Dengan Penulis, Pada Hari Rabu, 02 Maret 2022, Pukul 14:02 WIB, Di Kantor DPC PKB Kabupaten Grobogan, Wawancara 3, Transkrip.

agama apapun untuk bergabung di PKS, misalkan di daerah yang mayoritas non muslim di Papua, dewan pakar PKS beragama nasrani dan tidak ada masalah. Karena PKS dalam membangun negeri pun tidak sendiri pastinya ada ompenen bangsa dari berbagai suku Jawa, Sunda, Melayu dan lainnya dari berbagai agama muslim, nasrani, katholik, hindu, budha, konghuchu, Dalam konteks keagamaan juga sama menggandeng seluruh komponen karena bangsa Indonesia ada berbagai macam agama.”

Untuk menjadi anggota partai perlu adanya kaderisasi seperti pembinaan atau pelatihan dalam meningkatkan kualitas kepemimpinan dari jati diri seorang kader, dan kaderisasi PKS dilakukan secara berjenjang dengan 3 jenjang tahapan yakni jenjang pendukung, penggerak dan pelapor.

“Jenjang kaderisasi dari partai PKS sangat urut ada tujuh dari anggota pemula, anggota siaga, anggota muda, anggota pratama, anggota madya, anggota dewasa, anggota ahli. Jika anggota pemula dia yang telah memiliki KTA, anggota siaga dia yang aktif di partai berKTA dia aktif, kalau anggota muda dia aktif tapi kemudian ikut pembinaan yang rutin diadakan 1 pekan sekali ketika sudah ikut pembinaan rutin materi materi di anggota muda dia sudah menjadi anggota muda jadi sudah mengikuti pembinaan rutin 1 minggu sekali di PKS ada sistem unit pembinaan anggota/ UPA yang nantinya dikelompokkan dari orangnya ada 12 orang perwilayah jadi misalkan diwilayah Gubug, Kedungjati dll. Misalkan kita ada di dapil Gubug pembinaannya setiap jenjang ada jadi misalkan ada pembinaan di level madya, muda dll ada semua setiap daerah dan kebetulan memang di wilayah PKS Grobogan ini paling banyak kadernya di wilayah dapil 4 Gubug sama di dapil kota. Anggota pemula muda sampai pratama kemudian madya dewasa ada semua jadi unit pembinaan anggota ada

berapa dia terbina di UPA berapa nanti ada dan datanya akan kita sampaikan²⁴.”

Seperti yang telah diutarakan diatas ada 3 jenjang pendukung, penggerak, pelapor. Jenjang pendukung ada 2 level :

- 1) Kader pemula, orang yang dengan sukarela menjadi anggota PKS dengan memiliki KTA yang sudah masuk di kaderisasi partai sebagai kader level pemula dan dipemula ada level pembinaan, namun belum aktif di kegiatan PKS.
- 2) Kader siaga, anggota PKS yang mereka aktif dalam kegiatan PKS seperti bakti sosial, reses, milad, dan mulai terlibat di PKS, maka kemudian jenjangnya akan naik ke jenjang siaga namun belum mengikuti pembinaan pekanan UPA Unit pembinaan anggota yang dilakukan sepekan sekali. Namun ketika sudah komitmen untuk mengikuti UPA pertemuan tiap pekan, berarti jenjangnya sudah masuk menjadi anggota PKS jenjang muda sebagai anggota penggerak.

Jenjang Penggerak:

- a) Kader Muda, anggota yang sudah aktif dalam mengikuti kegiatan pembinaan rutin.
- b) Kader Pratama, dari anggota yang siap berkontribusi kepada bangsa dan negara bersama partai. Kader muda menjadi pratama ada kriterianya tertentu, seperti anggota pratama salah satu syaratnya minimal sudah menjadi anggota muda selama 1 tahun dan tidak ada batasan, kader yang sudah mengikuti kegiatan pembinaan sesuai dengan syarat dan penilaian yang telah ditentukan. Apabila terjadi pada seorang kader siaga yang sudah selama 1 tahun dinilai belum memenuhi indikator capaian maka kader tersebut tidak dapat naik ke jenjang berikutnya.

Untuk menjadi kader pratama syaratnya minimal 1 tahun pembinaan bisa 2, 3 tahun tergantung penilaian

²⁴ Beni Kasharnowo, Selaku Ketua Bidang Divisi Kaderisasi DPD PKS Kabupaten Grobogan, Wawancara Dengan Penulis, Pada Hari Jumat, 04 Maret 2022, Pukul 14:17 WIB, Di Kediaman Mrisi, Tanggunharjo, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, Wawancara 5, Transkrip.

kader tersebut sudah mampu atau layak menjadi kader pratama maka bisa naik ke jenjang berikutnya.

Jenjang Anggota Pelapor

- 1) Madya, anggota madya adalah anggota yang terkait dengan segala peraturan partai. Untuk menjadi madya salah satu syaratnya harus siap menjadi kader pratama minimal 2 tahun.
- 2) Dewasa, anggota yang menjadi dinamisator dalam kerja partai untuk menjadi kader dewasa minimal menjadi anggota madya 3 tahun.
- 3) Utama, anggota yang menjadi teladan partai untuk menjadi kader utama dia harus mengikuti dan menjadi anggota dewasa selama 4 tahun kemudian baru bisa menjadi anggota utama dengan seluruh sistem mekanisme kaderisasi yang ada diaturan partai.

Materi kaderisasi pada 5 pokok bidang studi PKS dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Keagamaan, fungsinya sebagai basic moral dan moderasi beragama (*wasathiyyah*) dalam Islam, agama-agama yang diakui di NKRI, mempunyai pondasi moral, ketaatan sesuai dengan pacasila sila pertama ketuhanan yang maha esa, kader partai harus kokoh dan kader partai PKS harus memiliki basic keagamaan dengan kuat sebagai tuntutan daripada pondasi kebangsaan Indonesia yaitu Pancasila.
- 2) Kebangsaan nasionalisme, Edukasi tentang politik dan demokrasi di Indonesia sebagai bagian daripada komponen bangsa Indonesia harus menguatkan nilai nilai kebangsaan terkait dengan 4 pilar kebangsaan Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinnika Tunggal Ika.
- 3) Kemasyarakatan, mengenal kebhinnekaan Indonesia bagaimana masyarakat Indonesia salah satunya kader PKS memiliki nilai nilai sosial, nilai nilai kemasyarakatan, nilai nilai persatuan.
- 4) Kepartaian, mengenal informasi tentang partai harus paham, aktif dipartai berarti harus tau apa tujuan partai, bagaimana menjadi anggota partai, karena partai merupakan bagian dari sarana

didalam berbangsa dan bernegara yang sah secara konstitusi.

5) Kepemimpinan Dan Kewirausahaan

Kader partai PKS harus menjadi pribadi yang religious, jikalau agamanya islam harus taat pada agamanya dan menjadi pribadi yang cinta terhadap negeri, membela negara, mempunyai jiwa nasionalisme sesuai yang tertuang dalam kaderisasi partai. Para kader harus menjadi anggota yang berperan sebagai masyarakat baik, menjadi anggota partai dan kader yang baik. Dari semua itu mereka disiapkan menjadi pemimpin dan wirausaha yang mandiri secara ekonomi, tidak bergantung pada orang lain, 5 pilar tersebut adalah sistem partai PKS.

Pada jenjang kaderisasi tentunya ada program dan pembinaan kader yang saranannya ada 4:

- a) UPA (Unit Pembinaan Anggota) pertemuannya per pekan sekali, yang sudah menjadi anggota muda, kalau yng anggota pemula dan siaga dia yang memiliki KTA da ikut kegiatan PKS.
- b) PPS (Pelatihan Peningkatan Spiritual) jadi kader itu dibina dididik agar spiritualnya naik seperti taat kepada tuhan, ketaatan nilai nilai moral, dan kegoatannya diadakan per tiga bulan sekali.
- c) PPW (Pelatihan Peningkatan Wawasan) yang diadakan per 3 bulan sekali, yang biasanya lebih mengacu pada materi materi kebangsaan misalnya pekan kemarin tentang wawasan nasional gatra, beberapa waktu yang lalu terkait dengan sistem bebas aktif Indonesia. Jadi materi materi kebangsaan itu disarana PPW
- d) PPK (Pelatihan Peningkatan Ketrampilan) pelatihan ketrampilan terkait kewirausahaan yang dilakukan 6 bulan sekali.

Jenjang pengkaderan yang telah dijelaskan diatas ditentukan kurun waktu masing masing level baik pemula dan anggota siaga yang memiliki KTA, anggota siaga tidak ada waktu karena telah mempunyai KTA dan mengikuti kegiatan rutin PKS. Tetapi kalau dia mempunyai KTA dan belum mengikuti kegiatan PKS berarti levelnya masih di pemula. Siaga untuk menjadi

muda ketika sudah masuk ke UPA dan pembinaan rutin otomatis menjadi anggota muda. Muda ke pratama ada kriteria waktu minimal satu tahun sesuai aturan AD/ART dan maksimal tidak ada, hal itu ditetapkan ketika materinya belum selesai ditempuh maka tidak bisa naik ke jenjang berikutnya, apabila materi yang ditempuh sudah selesai selama satu setengah maka diproses dalam SKJ (sistem kenaikan jenjang).

Apabila baru mengikuti UPA setengah tahun maka tidak bisa naik pratama, karena pratama ke madya butuh waktu 2 tahun, madya ke dewasa butuh waktu 3 tahun, madya ke dewasa menunggu 4 tahun. Seiring berjalannya PKS menilai kader dari segi keaktifan, kemampuan menerima materi, kontribusi terhadap partai dan sebagainya, penilaian tersebut menjadi dasar menaikkan jenjang karir. Ketika kader sudah masuk dalam partai dan mengikuti tahapan jenjang pengkaderan tentunya para kader akan mengikuti dan melakukan pembinaan penguasaan materi dan kurikulum kaderisasi partai, yang melakukan pembinaan adalah anggota yang sudah naik jenjang keatasnya.

“Minimal yang membina kader kader tersebut adalah kader yang satu tingkat diatasnya, misal pembinaan pada kader muda minimal yang membina harus pratama, madya dan selanjutnya yang jenjangnya lebih tinggi dari kader muda. Karena penjenjangan itu bagian dari level kepemimpinan bagi yang serius menjadi kader partai. Isi sistem kaderisasi partai/ SKP PKS secara garis besar mengarah kelima pancasila yakni Keagamaan, Kebangsaan nasionalisme, kemasyarakatan, kepartaian dan kepemimpinan kewirausahaan sesuai dengan Wawasan kebangsaan pancasila²⁵.”

Yang menangani dan bertanggung jawab dalam sistem pengkaderan PKS adalah bidang divisi kaderisasi yang diketuai oleh Kasharnowo, SE sesuai

²⁵ Beni Kasharnowo, Selaku Ketua Bidang Divisi Kaderisasi DPD PKS Kabupaten Grobogan, Wawancara Dengan Penulis, Pada Hari Jumat, 04 Maret 2022, Pukul 14:17 WIB, Di Kediaman Mrisi, Tanggunharjo, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, Wawancara 5, Transkrip

dengan struktur kepengurusan dalam menangani bidangnya masing masing, sekertaris yang mengurus keanggotaan dan kurikulum kaderisasi. Para pengurus memantau dari seluruh anggota di Kabupaten Grobogan setiap tiga bulan dengan mengadakan pertemuan dan pembinaan sebagai bentuk pertemuan dalam pembahasan promosi untuk naik ke jenjang atau level berikutnya sesuai dengan kemampuan.

Ada divisi kaderisasi yang bertanggung jawab, ada sekertarisnya ada yang mengurus keanggotaannya ada yang mengurus kurikulum, ada yang mengurus terkait penjenjangannya. Jadi dari PKS ada pengurus tersendiri dikaderisasi yang memang memantau dari seluruh anggota di Kabupaten Grobogan yang pertiga bulan ada pertemuan pembimbing pembinanya, setiap setengah tahun sekali atau perenam bulan sekali akan kita promosikan. Jadi maksimal per setengah tahun ada pelantikan dari masing masing jenjang, jadi per enam bulan pasti akan kita sampaikan dari DPD PKS kepada bawah siapa saja yang bisa dinaikkan jenjang sesuai dengan kemampuan.

Hasil yang didapat dari capaian kapasitas masing masing level perjenjangan mengacu pada indikator capaian 5 pilar partai PKS sesuai dengan bidang studi pokok masing masing, indikator tersebut menggunakan sistem SKS jika mau lulus harus sesuai dan memenuhi jumlah indkator capaian di PKS. Dari keseluruhan output yang didapat dalam sistem kaderisasi PKS wawasan mengenai politik dan pemerintahan seperti yang telah ditulis dibawah ini

“Output dari kaderisasi mengacu pada indkator capaian 5 pilar partai PKS, yang jumlahnya harus sesuai dengan PKS, kader yang telah selesai di jenjangnya harus selesai di poin indicator capaian PKS, kalau belum lulus itu jenjangnya tidak akan naik.”

Sistem kaderisasi PKS secara otomatis mereka para anggota kader partai dalam mendapatkan karir politik bersifat terbuka untuk siapa saja dengan mekanisme aturan partai yakni harus melewati beberapa

jenjang dan menguasai materi 5 pilar PKS sesuai dengan waktu yang ditentukan.

“Sangat terbuka, namun karir di PKS ada mekanisme yang tidak bisa serta merta seseorang menduduki suatu jabatan tertentu tanpa melalui mekanisme aturan partai, misalkan contohnya ada seseorang yang secara financial mampu dan bertemu dengan ketua DPD PKS meminta menjadi ketua DPC tingkat kecamatan hal itu tidak bisa. Karena belum mengikuti mekanisme perjenjangan level dan penilaian di PKS. Karena partai tidak ingin menyerahkan amanah kepada seseorang yang belum cakap, PKS mengacu pada penilain dan perjenjangan karena tidak sembarangan kepemimpinan diserahkan kepada orang yang belum berkompeten, karir politik tetap terbuka pada siapapun bagi yang memang sudah mengikuti jalur mekanisme kaderisasi sesuai dengan alurnya²⁶.”

3. Faktor Pendukung Serta Penghambat Rekrutmen Dan Kaderisasi Partai Kebangkitan Bangsa Dan Partai Keadilan Sejahtera Tahun 2020 dan 2021.

a. PKB

Faktor pendukung dari proses rekrutmen PKB adalah secara SDM pada tahap penjangkaran atau serifikasi partai PKB cukup banyak memiliki stok para kader yang mampu diajukan menjadi bakal calon legislatif/ sebagai pejabat publik. Untuk faktor penghambatnya dari SDM yang melimpah tentunya sebagian dari mereka terhambat dalam hal financial ketika ingin mencalonkan diri sebagai bakal calon legislatif pastinya mengeluarkan banyak biaya yang menyebabkan para kader enggan dalam hal mencalonkan bakal calon legislatif²⁷.

Faktor yang mendukung sistem kaderisasi adalah adanya kemauan masing masing peserta untuk menjadi

²⁶ Beni Kasharnowo, Selaku Ketua Bidang Divisi Kaderisasi DPD PKS Kabupaten Grobogan, Wawancara Dengan Penulis, Pada Hari Jumat, 04 Maret 2022, Pukul 14:17 WIB, Di Kediaman Mrisi, Tanggunharjo, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, Wawancara 5, Transkrip.

²⁷ Mustain, Selaku Ketua DPC PKB Kabupaten Grobogan, Wawancara Dengan Penulis Pada Hari Rabu, 02 Maret 2022, Pukul 13:23 Wib, Di Kantor DPC PKB Kabupaten Grobogan, Wawancara 1, Transkrip.

calon kader, sistem yang ditawarkan PKB tidak bersifat memaksa karena PKB tidak memiliki wewenang dan jaminan terhadap mereka. Faktor penghambatnya adalah mengenai status, ketika kader yang sudah masuk di PKB dan mempunyai KTA tentunya akan terkendala terhadap pekerjaan tertentu yang salah satunya syarat tidak diperbolehkan terlibat partai politik, maka kader tersebut akan komplin untuk dibuatkan surat keterangan dari partai. Jadi yang menjadi faktor penghambat adalah status kader dipartai yang dapat menghalangi kesempatan untuk mencari pekerjaan, utamanya para kader muda yang baru di rekrut sudah berhenti dipertengahan jalan.

“Faktor yang mendukung kemauan masing masing dari peserta atau calon kader, sistem yang kita tawarkan, tidak begitu melulu untuk memaksa karena sistemnya dari PKB landai, PKB santai riang gembira. Faktor penghambatnya soal status, ketika mereka sudah masuk ke PKB, mempunyai KTA itu biasanya mereka protes ketika mereka ingin menjadi penyelenggara pemilu contoh ketika seseorang sudah dibuatkan dan memiliki KTA resmi dari PKB itu orang tersebut tidak bisa menjadi penyelenggara KPPS, PPS, PPK, dll itu tidak bisa termasuk kendala pekerjaan. Contoh ketika mendapatkan atau mencari kerja disitu ada poin tidak pernah menjadi anggota atau pengurus partai. Kasusnya banyak yang kemarin ingin meminta dibuatkan surat keterangan untuk tidak mencabut kader partai kendalanya disitu, jadi ketika kita merekrut dia sudah masuk tapi dikehidupan pribadinya dia ingin bekerja justru itu yang menjadi penghambat status mereka dipartai itu yang menjadi menghalangi kesempatan mereka untuk mencari pekerjaan maupun jenjang yang lain pekerjaan diluar sana.”

Kebijakan dari partai PKB tentunya membuat surat keterangan pengunduran diri terlibat partai politik, PKB tidak menghambat mereka akan hal itu karena dari partai PKB sendiri tidak bisa menjamin kader tersebut mendapatkan pekerjaan menjadi pengurus partai atau lainnya.

“Tentunya dari kita membuat surat keterangan jadi dari PKB kita tidak bisa membelenggu mereka dan tidak bisa mengikat mereka, jadi mereka pengennya seperti apa ingin mengundurkan surat pengunduran diri kita buat karena di PKB kita tidak mau untuk menghalangi yang berbicara soal pekerjaan karena dari PKB sendiri tidak bisa menjamin mencarikan mereka pekerjaan²⁸.”

b. PKS

Faktor yang menjadi pendukung dalam proses rekrutmen politik adalah partai mampu mencetak kader atau melahirkan pemimpin yang bertanggung jawab, mampu menentukan para kader yang terpilih dan layak menjadi pejabat publik dalam menampung aspirasi masyarakat.

“Faktor pendukungnya karena kita partai yang paling bagus kan partai yang fungsinya mencetak kepemimpinan berdasarkan pada kader yang telah melewati proses kaderisasi Di PKS yang mendasari dengan itu kemudian kita di kaderisasi bukan sesuatu yang tidak dianggap remeh jadi justru malah menjadi sesuatu yang utama jadi tidak mudah untuk kemudian mendadak membawa orang baru menjadi ketua PKS atau pengurus pada partai tidak semudah itu pastinya melewati proses yang dijalankan sesuai dengan AD/ART dan mengikuti perkembangan partai.”

Salah satu faktor yang menghambat dalam proses rekrutmen politik adalah kegagalan partai politik dalam menyiapkan kader partai karena belum melembaganya mekanisme rekrutmen secara terbuka dan sistematis, lemahnya kedudukan anggota partai dalam kehidupan di partai politik seperti munculnya seglinter penguasa partai, terpilihnya mereka yang mengandalkan popularitas termasuk dalam tokoh besar, memiliki modal yang mampu secara finansial dan memiliki hubungan nepotis kedekatan/ kerabat dengan pimpinan partai sehingga menjadikan rekrutmen politik tidak sistematis yang mampu berdampak pada tersisihnya kandidat yang

²⁸Fathoni, Selaku Ketua Bidang Divisi Kaderisasi DPC PKBKabupaten Grobogan, Wawancara Dengan Penulis, Pada Hari Rabu, 02 Maret 2022, Pukul 14:02 WIB, Di Kantor DPC PKB Kabupaten Grobogan, Wawancara 3, Transkrip.

berkompeten dan memenuhi kualifikasi sebagai bakal calon anggota legislatif maupun eksekutif.

“Sedangkan faktor yang menghambat adalah sekarang ini maraknya partai politik yang merekrut seorang caleg atau pejabat publik hanya pada tokoh atau orang yang memiliki popularitas dan pengaruh yang besar kedepannya pada paerati, dia yang menjadi pengusaha dan lain lain yang pastinya perekrutan mampu secara financial²⁹.”

Sedangkan faktor yang mendukung dari kaderisasi adalah kualitas SDM yang cukup banyak dimiliki partai PKS tentunya untuk berkontribusi dalam pemerintahan, SDM yang berkualitas dapat memberikan harapan pada partai. Tidak hanya kuantitasnya hanya memiliki KTA dan mampu secara financial, namun tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perubahan bangsa. Salah satu fungsi kaderisasi adalah mencetak seorang kader/ anggota partai yang memiliki kualitas baik, jika kualitasnya baik maka peran kader akan lebih besar dalam menyumbangkan pemimpin. SDM yang melimpah dapat menjadi kesempatan untuk para kader mengambil hati rakyat dan dipercayai menjadi bupati, anggota dewan, yang dapat menyuarakan aspirasi keinginan masyarakat. PKS mencari kader yang memiliki kualitas yang baik dalam menjadi wakil rakyat, bukan hanya mampu secara financial tetapi tidak berkompeten, tidak memiliki wawasan luas untuk menjadi pemimpin.

“Faktor pendukungnya adalah dari adanya kaderisasi partai mampu mengumpulkan banyak SDM yang nantinya tujuannya bisa menjalankan fungsi partai baik sebagai pemimpin wakil rakyat maupun pengurus partai.”

Faktor penghambat dalam kaderisasi adalah perlunya edukasi terhadap masyarakat yang abai, pragmatis dalam hal menentukan pemimpin. Seperti halnya masyarakat lebih memilih kepemimpinan yang tidak dilihat kualitasnya karena adanya faktor money politic ketika pilkada dan pemilu, hanya melihat sisi pencitraannya saja namun menghiraukan kualitas

²⁹ Suranto, Selaku Ketua DPD PKS Kabupaten Grobogan, Wawancara Dengan Penulis, Pada Hari Jumat, 04 Maret 2022, Pukul 13:14 WIB, Di Kediaman Tanggunharjo Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, Wawancara 4, Transkrip.

menjadi pemimpin. Di era digital teknologi sekarang yang semakin berkembang pesat banyak orang yang terlihat biasa namun memiliki tim sosmed yang kuat untuk melakukan pencitraan sebagai upaya menarik perhatian masyarakat menjadi tim pendukungnya. Hal tersebut merupakan sesuatu yang tidak diharapkan, karena seharusnya tantangan masyarakat membutuhkan edukasi, jadi salah satu yang menjadi kelemahan demokrasi yang kurang berjalan dengan maksimal. Syarat untuk meminimalisir hal itu antara lain masyarakatnya harus terdidik dan ekonominya sejahtera, jika masyarakatnya terdidik dan sejahtera maka akan mampu memilih dan menentukan pemimpin yang baik. Besar kemungkinan apabila orang terdidik dan secara financial ekonominya mampu dan sejahtera maka suara tidak mungkin bisa dibeli dan disuruh dalam memilih caleg yang tidak berkualitas.

“Sebenarnya dalam kaderisasi tidak ada hambatan namun kurang lebihnya tantangan dalam megedukasi masyarakat untuk menentukan pemimpin yang baik, yang bisa mengerti kebutuhan masyarakat dalam perekonomian dan mengubah pemikiran yang maju akan negara yang lebih baik³⁰.”

Jadi secara keseluruhan kelemahan PKS masih banyak yang belum terpelajar, terdidik, dan rakyat masih serba kekuarangan, rakyat tidak akan peduli siapa yang nantinya menjadi pejabat pemerintahan. Maka tantangan/hambatannya adalah bagaimana mengedukasi masyarakat untuk cerdas dalam memahami politik. Memilih pemimpin sangat penting untuk menentukan nasib masyarakat 5 tahun kedepan. Maka tugas kita adalah mengedukasi masyarakat untuk objektif dalam memilih pemimpin, salah satu tantangannya di money politic, namun di PKS lebih mengacu pada bagaimana para kader berkontribusi dinegeri ini.

Pada intinya PKS terbuka meskipun tidak lepas dari isu miring partai, uniknya di PKS ketika ada banyak

³⁰ Beni Kasharnowo, Selaku Ketua Bidang Divisi Kaderisasi DPD PKS Kabupaten Grobogan, Wawancara Dengan Penulis, Pada Hari Jumat, 04 Maret 2022, Pukul 14:17 WIB , Di Kediaman Mrisi, Tanggunharjo, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, Wawancara 5, Transkrip.

caleg yang masuk nominasi kandidasi, dan salah satu caleg PKS ada yang gagal dalam pencalonan, maka orang tersebut akan mendapatkan dana kerahiman. Jadi sesama bakal caleg yang terpilih maupun tidak sama sama saling memikul beban dari caleg yang gagal di pemilihan, karena mau tidak mau calon legislatif yang terpilih harus berkontribusi. Misalkan ada 8 caleg untuk menjadi anggota DPRD, minimal 10.000 suara salah satu caleg mendapatkan 4000 suara berarti masih ada 6000 suara dan 6000 suara untuk caleg yang lain, bahkan ketika caleg sudah jadi harus ada kontribusi kepada caleg yang gagal dengan cara musyawarah. Salah satu tujuan kaderisasi membangun hubungan yang kuat sesama anggota partai juga membangun ukhuwwah tidak hanya anggota partai saja tetapi seluruh lapisan masyarakat, di PKS tentunya meminimalisir konflik walaupun adanya perpecahan dan perbedaan pendapat sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Tetapi PKS meminimalisir akan hal itu, siapapun yang menjadi anggota PKS sangat terbuka dari latar belakang apapun baik agama, suku, tanpa membeda bedakan.

C. Analisis Data Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian diatas selanjutnya peneliti akan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi dengan memaparkan hasil dari analisis data Open Rekrutmen dan Sistem Kaderisasi Partai Islam (Studi Komparasi DPC PKB dan DPD PKS di Kabupaten Grobogan Tahun 2020-2021). Untuk menjawab rumusan masalah dan melakukan perbandingan mengenai penelitian diatas maka penulis menggunakan 3 teori tentang partai politik, rekrutmen politik dan kaderisasi partai politik.

1. Analisis Perbandingan Rekrutmen Politik Pada Partai Kebangkitan Bangsa Dan Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Grobogan Tahun 2020-2021.

PARTAI POLITIK	REKRUTMEN POLITIK		
	SERTIFIKASI	NOMINASI	PEMILU
PKB	<p>Persyaratan umum berdasarkan UU pemilu dan peraturan internal partai kriteria yang dikehendaki PKB :</p> <p>a) Kandidat diutamakan prioritasnya dari kader NU, karena pada dasarnya PKB tujuannya membesarkan NU dan para kandidat harus mampu secara financial.</p> <p>b) Pendidikan minimal berijazah SMA baik dari anggota DPRD maupun pengurus partai.</p> <p>c) Memiliki kemampuan, kompetensi, rekam jejak yang baik, tidak berstatus pidana, aktif, loyalitas terhadap partai,</p>	<p>Proses rekrutmen politik ada 4 tahapan nominasi:</p> <p>1) Siapa yang menyeleksi : Seleksi para kandidat dilakukan oleh Tim Mantap PKB yakni ketua DPC PKB Kabupaten Grobogan H.Musta'in dibantu dengan jajaran pengurus Dewan Syuro/ Tim Mantap meliputi Ketua Dewan Syuro, Sekertaris Dewan Syuro, Ketua Dewan Tanfidz, Sekertaris Dewan Tahfidz, Ketua Dewan Pertimbangan Unsure Perempuan yaitu Ketua Perempuan Bangsa.</p> <p>2) Dimana</p>	<p>Pemberian nomor urut oleh Tim Mantap PKB, setelah itu mengikuti aturan pemilu yang diselenggarakan KPU.</p>

	<p>nilai/ sekor terhadap potensi elektabilitas apakah calon tersebut pernah menjadi pengurus atau menduduki jabatan politik tertentu.</p> <p>d) Bakal caleg bertempat tinggal di daerah pemilihan karena untuk mengetahui mengenai aspirasi masyarakat terhadap daerah pemilihannya yang belum dicapai.</p>	<p>kandidat diseleksi: Seleksi dilakukan di Kantor DPC PKB Grobogan.</p> <p>3) Bagaimana metode seleksi: Metode yang digunakan wawancara dengan mekanisme pembuatan formulir pengumuman di media sosial kemudian disosialisasikan baik di internal partai maupun eksternal partai sesuai dengan prosedurnya diharapkan bacaleg harus mampu secara financial.</p> <p>4) Bagaimana kandidat diputuskan: Kandidat diputuskan melalui Tim Mantap dari PKB.</p>	
<p>PKS</p>	<p>Sesuai undang undang pemilu dan AD/ART PKS kriteria sebagai berikut:</p>	<p>Proses rekrutmen politik ada 4 tahapan nominasi:</p> <p>1) Siapa yang menyeleksi :</p>	<p>Pemberian nomor urut oleh Tim Panjatida PKS, setelah itu mengikuti aturan pemilu</p>

	<p>a) Berkebangsaan WNI, berkewarganegaraan Indonesia, bersedia mengikuti dan menjalankan AD/ART partai</p> <p>b) PKS tidak membatasi individu yang berbeda agama untuk menjadi anggota partai/ pejabat publik, karena PKS membuka ruang untuk semua yang berbeda agama sebagai bentuk mempererat persatuan bangsa tanpa membedakan ras/ agama.</p> <p>c) Kandidat tidak terlibat kasus narkoba dan pelanggaran sosial lainnya.</p> <p>d) memiliki kemampuan dan pengetahuan yang luas dalam hal agama, kepemimpinan, pemerintahan dan lain lain.</p> <p>e) Para kandidat berdomisili sesuai dengan</p>	<p>Tim Panjatida (Panitia Penjaringan Mutiara Daerah)/ Pansel (Panitia Seleksi)</p> <p>2) Dimana kandidat diseleksi: Seleksi dilakukan di Kantor DPD PKS Grobogan.</p> <p>3) Bagaimana metode seleksi: Metode yang digunakan wawancara yang sesuai dengan prosedurnya.</p> <p>4) Bagaimana kandidat diputuskan: Kandidat bakal calon legislatif diputuskan oleh Tim Panjatida serta pemberian nomor urut pada bakal calon legislatif tersebut. partai PKS menerima siapapun baik mereka yang memiliki tracks moral atau kasus lain asalkan mengikuti perjenjangan keanggotaan sesuai AD/ART</p>	<p>yang diselenggarakan KPU.</p>
--	---	---	----------------------------------

	<p>wilayah pemilihan.</p> <p>f) Utamanya kader wajib mengikuti dan melewati jenjang keanggotaan mulai dari anggota pendukung (pemula, siaga), anggota penggerak (muda, pratama), anggota pelopor (madya, dewasa, utama). Jika tidak mengikuti maka kandidat tidak dapat naik ke jenjang karir sebagai pengurus atau pejabat publik, karena mejadi pemimpin harus memiliki loyalitas, kemampuan yang tinggi, dan mampu secara financial.</p>	<p>PKP.</p>	
--	---	-------------	--

Tabel 4.1 Perbandingan Rekrutmen Politik PKB dan PKS

Seperti yang telah diuraikan dari hasil deskripsi penelitian dan tabel diatas mengenai tahapan rekrutmen politik sertifikasi, nominasi dan pemilu masing masing kedua partai PKB dan PKS di kabupaten Grobogan memiliki perbedaan dan persamaan. Di tahapan sertifikasi dalam merekrut bakal calon legislatif semua prosedur sama dengan undang undang ketentuan pemilu dan AD/ART partai politik

seperti kandidat berkebangsaan WNI, jenjang pendidikan minimal SMA, tidak terlibat kasus sosial, dan tentunya bertempat tinggal di daerah pemilihan. Akan tetapi ada kriteria yang berbeda dari kedua partai tersebut seperti PKB diprioritaskan yang menjadi bakal calon legislatif utamanya dari kader NU dan beragama Islam karena salah satu tujuan PKB termasuk dalam membesarkan NU. Sedangkan PKS membuka ruang untuk agama apapun bergabung dipartai, untuk menjadi calon legislatif/ anggota dewan pun diutamakan mereka yang telah mengikuti dan melewati tahap perjenjangan dari pratama ke dewasa. Jadi dapat disimpulkan pada tahapan sertifikasi setiap ketentuan undang-undang pemilu dikatakan sama, sedangkan kriteria dari masing-masing partai berbeda sesuai dengan AD/ART dan ideologi partai tersebut.

Tahapan kedua nominasi dengan menggunakan 4 pokok penting siapa yang menyeleksi kandidat, dimana kandidat diseleksi, bagaimana metode seleksi tersebut dan bagaimana kandidat diputuskan³¹. Dari masing-masing partai PKB dan PKS proses penyeleksian berbeda-beda sesuai dengan lembaga partai itu sendiri, seperti terkait siapa yang dinominasikan PKB bersifat inklusif setiap pemilih dapat menjadi kandidat partai, sedangkan PKS bersifat eksklusif membatasi hak pemilih untuk ikut serta dalam kandidasi dengan persyaratan harus melewati 7 level jenjang kaderisasi PKS terlebih dahulu. PKB menyeleksi kandidat bacaleg dari fraksinya dilakukan oleh Tim Mantap yang bertempat di kantor DPC PKB dan PKS menyeleksi kandidat bacaleg dari fraksinya oleh Tim Panjatida di kantor DPD PKS kemudian kandidat diputuskan melalui tim masing-masing partai, kedua partai tersebut menggunakan metode desentralisasi dimana seleksi dilakukan secara eksklusif hanya melibatkan pimpinan partai, penyeleksi partai lokal dan anggota partai. Sedangkan persamaannya adalah metode yang digunakan keduanya wawancara, kemudian model proses seleksi PKB dan PKS menggunakan informal terlokalisasi dimana penguasa lokal memutuskan prosedur umum yang digunakan dalam rekrutmen politik seperti penentuan bakal calon legislatif hanya melibatkan tim internal partai tidak melibatkan sebagian masyarakat pada umumnya.

³¹ Sigit Pamungkas, *“Partai Politik Teori Dan Praktik Di Indonesia”*, (Yogyakarta: Institute For Democracy And Welfarism (IDW), 2011), Hlm.93.

Selanjutnya adalah tahapan pemilu, mereka yang telah terpilih masuk dalam bakal calon legislatif diberikan nomor urut sesuai dengan tim masing masing partai yakni PKB oleh Tim Mantap dan PKS oleh Tim Panjatida. Selebihnya para bakal caleg tersebut mengikuti aturan Pemilu yang ditentukan oleh KPU.

Menurut peneliti dari proses rekrutmen politik pada partai PKS dan PKB di kabupaten Grobogan telah beredoman prinsip rekrutmen ideal diantaranya syarat untuk mendaftarkan diri bakal caleg secara keseluruhan mereka yang loyal, setia, bersih dari pelanggaran norma sosial, proses rekrutmen politik transparan/ terbuka untuk semua anggota partai, meritokrasi dipilih sesuai dengan kemampuan untuk menjadi pejabat publik, penentuan kandidat secara demokratis melalui tahap wawancara, penentuan kandidat dilibatkan oleh pimpinan dan pengutus partai/ desentralisasi, kecukupan dalam pembiayaan, keterbukaan akses dan seleksi dilakukan pada siapa saja tanpa membedakan status sosial ekonomi.

Rekrutmen politik dari tahun sebelumnya, untuk tahun 2020, 2021 sampai sekarang baik di partai PKB dan PKS tidak ada perubahan secara signifikan mulai dari tahapan seleksi, penyeleksi, tempat seleksi, metode seleksi, model rekrutmen dan lainnya secara keseluruhan belum ada perubahan, namun ketika ada musyawarah nasional di PKS hanya ada perubahan logo partai yang hitam dan kuning menjadi putih dan orange.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwasannya rekrutmen politik PKB jauh lebih baik daripada PKS itu dibuktikan dengan perolehan suara dalam pilkada dan pemilu selalu mendapatkan suara terbanyak setelah PDIP yakni 26.441%, menurut peneliti alasan pertama karena PKB salah satunya partai islam berbasis tradisional bersifat santai dan mampu berbaur terhadap masyarakat desa yang secara geografis di kabupaten Grobogan mayoritas pedesaan. Kedua PKB bersifat sebagai politik kehadiran, hadir dalam setiap acara pemerintah maupun keagamaan seperti pilkada, acara pengajian, selamatan dan lain lain sehingga PKB dianggap oleh masyarakat sebagai kaum sarungan, secara cultural ajaran dan praktek ibadah NU PKB lebih mudah diterima masyarakat

pedesaan³². Tak hanya itu anggota PKB Kabupaten Grobogan juga dominan berasal dari kaum santri dan tokoh kyai yang lebih disegani dan disenangi masyarakat desa karena ceramahnya dan penampilannya. Sedangkan di PKS adalah partai islam berbasis islamis, seperti yang telah disinggung di latar belakang bahwasannya PKS banyak diminati oleh masyarakat perkotaan karena pemikirannya yang modern dan diminati oleh kelompok pemuda, sehingga dalam hal perolehan suara jauh lebih unggul dari PKB dengan alasan yang telah disebutkan diatas.

2. Analisis Perbandingan Sistem Kaderisasi Pada Partai Kebangkitan Bangsa Dan Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Grobogan Tahun 2020-2021

PARTAI POLITIK	SISTEM KADERISASI PARTAI		
	TERBUKA	NON DESKRIMINATIF	BERJENJANG
PKB	Proses kaderisasi PKB bersifat terbuka, diumumkan di media sosial, PKB mengikuti era milenial dan era gobalisasi yang sekarang sebagai era keterbukaan teknologi lebih mencondongkan ke publikasi yang murah lewat media sosial	Non diskriminatif kaderisasi PKB membuka ruang yang sama untuk semua anggota mengikuti dan memperoleh promosi karir politik baik menjadi pengurus maupun pejabat pemerintah.	Tidak dikatakan secara jelas adanya jenjang level kaderisasi PKB, namun PKB membawahi kaderisasi dari a) Garda Bangsa kader tingkat muda yang segmennya adalah kader pemuda. b) Gemasaba (gerakan mahasiswa satu bangsa) yang

³² Ridho Alhamdi, "Partai Politik Islam: Teori Dan Praktik Di Indonesia", (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm,17-18.

			tingkatannya masih rendah yang diwadahi oleh Garda Bangsa. c) Perempuan Bangsa yang segmennya para wanita di PKB yang memberikan wadah perempuan belajar politik.
PKS	Kaderisasi PKS bersifat inklusif atau terbuka partai PKS terbuka untuk semua yang beragama apapun dengan catatan sudah tergabung dalam anggota partai, PKS menyesuaikan wilayah yang basisnya sesuai agama yang dianut.	Non diskriminatif kaderisasi dalam partai PKS tidak bersifat memaksa, dan tentunya bagi yang mengikuti dan aktif dalam pelatihan atau pembinaan dapat dipromosikan untuk naik jenjang di karir politik tanpa membedakan golongan, status dan jenis kelamin.	Kaderisasi PKS dilakukan sesuai dengan masing masing level perjenjangan, ada 3 Jenjang pendukung, penggerak, dan pelopor. Jenjang pendukung ada 2: 1) Anggota Pemula (memiliki KTA, tapi belum aktif di partai). 2) Anggota Siaga (sudah berKTA dan aktif namun belum mengikuti pembinaan. Jenjang Penggerak :

			<p>1) Anggota Muda (aktif dan mengikuti pembinaan minimal 1 tahun).</p> <p>2) Anggota Pratama (aktif dan mengikuti pembinaan minimal 2 tahun).</p> <p>Jenjang Pelapor :</p> <p>1) Anggota Madya (aktif dan mengikuti pembinaan minimal 3 tahun).</p> <p>2) Anggota Dewasa (aktif dan mengikuti pembinaan minimal 4 tahun).</p> <p>3) Anggota Utama (ketika kader sudah mencapai level pengurus partai tingkat provinsi).</p>
--	--	--	--

Tabel 4.1 Perbandingan Sistem Kaderisasi PKB dan PKS

Sistem kaderisasi pada partai politik sangat penting karena kaderisasi merupakan inti dari perjuangan partai politik dimasa depan, tanpa kaderisasi partai politik tidak akan maju dan bergerak dalam menjalankan fungsinya salah satunya mempersiapkan calon pemimpin dan mengelola partai di masa depan. Pada tabel diatas kaderisasi partai politik yang

baik adalah kaderisasi yang menganut 3 prinsip yakni Terbuka, Non diskriminatif dan Berjenjang³³.

Dilihat dari persamaannya kaderisasi pada Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Keadilan Sejahtera prosesnya bersifat terbuka dan non diskriminatif yang artinya anggota partai berkesempatan mengikuti kegiatan partai dan mendapatkan pelatihan yang sama serta akses dalam karir politik. Proses kaderisasi PKB diumumkan lewat media sosial karena PKB mengikuti era milenial dan era gobalisasi, sebagai era keterbukaan teknologi yang lebih fokus pada publikasi dengan tahapan ketika seseorang mendapatkan informasi, berminat mendaftar menjadi kader dan siap untuk direkrut maka proses seleksi kaderisasi dilakukan. Para calon kader partai dihubungi untuk mengikuti pelatihan, penyuluhan hukum, sosialisasi, pendidikan politik selanjutnya ke jenjang yang lebih serius di tahap rekrutmen.

Kaderisasi PKB membuka peluang besar dalam karir politik, dimana mereka sendiri yang menentukan pada keseriusan individu masing masing, segala konsekuensi untuk serius seperti faktor bagaimana dia bekerja penuh terhadap partai mulai dari turun kelapangan turun kebawah menyapa lapisan masyarakat dan rajin menyapa konstituennya dengan feedback mendapatkan citra dan suara terbanyak dari masyarakat untuk mencapai karir politiknya. Namun tentunya untuk mendapatkan semua itu membutuhkan biaya, di PKB tidak dapat menjamin bagaimana tentang pembiayaan yang dikeluarkan namun hanya bisa saling gotong royong untuk meringankan kinerja calon legislatif.

Sedangkan PKS terbuka secara nasional religious membuka dari untuk agama apapun untuk bergabung di PKS dengan menyesuaikan di daerah pemilihan yang memungkinkan mayoritas muslim atau non muslim. Seperti contoh di Papua, dewan pakar PKS yang mayoritas beragama nasrani dan tidak menjadi permasalahan bagi PKS, karena PKS menyesuaikan dengan Indonesia dimana terdapat agama, suku dan budaya yang berbeda beda. Oleh sebab itu dalam

³³ Syamsudin Haris dkk, *Panduan Rekrutmen & Kaderisasi Partai Politik Ideal Di Indonesia*, ed. by Bhakti Ikrar Nusa dan Nurhasim Moch, *Panduan Rekrutmen & Kaderisasi Partai Politik Ideal Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedepuitian Pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi Bekerja sama dengan Pusat penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik LIPI), 2016). Hlm.52.

membangun negeripun PKS tidak secara mandiri karena pastinya terdapat komponen bangsa dari berbagai suku Jawa, Sunda, Melayu dan lainnya dan dalam konteks keagamaan muslim, nasrani, katholik, hindu, budha, konghuchu juga sama menggandeng seluruh komponen bangsa. PKS bersifat non diskrimintif tidak bersifat memaksa, dan tentunya bagi yang mengikuti dan aktif dalam pelatihan atau pembinaan yang lolos dalam sesuai jenjang dapat dipromosikan untuk naik jenjang di karir politik tanpa membedakan golongan, status dan jenis kelamin.

Prinsip ketiga adalah kaderisasi dilaksanakan secara berjenjang dan bertahap mulai dari tingkat dasar, tingkat menengah dan tingkat lanjut yang berkaitan dengan kehidupan internal partai, kaderisasi dilakukan sebagai bentuk kebutuhan untuk pembekalan kapasitas kader. Seperti yang ada didalam tabel jenjang pengkaderan pada PKB tidak disebutkan secara jelas namun narasumber hanya menyebutkan kaderisasi pada sayap PKB mulai dari:

- a) Garda Bangsa kader yang segmennya adalah pemuda, dari kader tingkat muda.
- b) Gemasaba (Gerakan Mahasiswa Satu Bangsa) segmennya adalah para mahasiswa dari berbagai kampus, yang mewadahi Gemasaba adalah para pemuda Garda Bangsa.
- c) Dari kalangan perempuan adalah Perempuan Bangsa segmennya hanya wanita di PKB yang memberikan wadah para perempuan untuk belajar politik.

Setelah terolah dalam sayap partai para kader akan ditentukan oleh seleksi alam dimana mereka akan lanjut atau tidak ke jenjang selanjutnya yakni di politik praktis atau sebagai simpatisan (seseorang yang mendukung), jikalau politik praktis para kader sudah mulai memberanikan diri untuk mencalonkan sebagai anggota legislatif. Kemudian untuk jenjang kaderisasi PKS ada 3 jenjang pendukung, penggerak dan pelapor. Jenjang pendukung ada 2 level :

- 1) Kader pemula, orang yang dengan sukarela menjadi anggota PKS namun belum aktif di kegiatan PKS.
- 2) Kader siaga, anggota PKS yang aktif dalam kegiatan PKS seperti bakti sosial, reses, milad, dan mulai terlibat di PKS, namun belum mengikuti pembinaan pekanan UPA Unit pembinaan anggota yang dilakukan sepekan sekali.

Jenjang Penggerak:

- a) Kader Muda, anggota yang sudah aktif dalam mengikuti kegiatan pembinaan rutin minimal selama 1 tahun atau maksimal lebih dari itu. Jika kader tersebut sudah 1 tahun/ lebih dinilai belum memenuhi indikator capaian maka tidak dapat naik ke jenjang berikutnya.
- b) Kader Pratama, Kader sudah menjadi anggota muda dan mengikuti kegiatan pembinaan selama minimal 2 tahun, sesuai dengan syarat dan penilaian yang telah ditentukan.

Jenjang Anggota Pelapor

- 1) Kader Madya, anggota yang terikat terhadap segala peraturan partai dengan syaratnya harus siap menjadi kader madya minimal 3 tahun.
- 2) Kader Dewasa, anggota yang menjadi dinamisator kerja partai dengan minimal menjadi anggota madya 4 tahun.
- 3) Kader Utama, anggota yang menjadi teladan partai.

PKS juga ada program dan pembinaan kader yakni UPA (Unit Pembinaan Anggota) dengan pertemuan 1 pekan sekali, PPS (Pelatihan Peningkatan Spiritual) kader dibina dan dididik dalam hal spiritual seperti taat kepada tuhan, nilai moral, dan kegoataan yang diadakan tiga bulan sekali, PPW (Pelatihan Peningkatan Wawasan) diadakan 3 bulan sekali yang biasanya lebih mengacu pada materi kebangsaan, PPK (Pelatihan Peningkatan Ketrampilan) pembinaan dalam ketrampilan terkait kewirausahaan yang dilakukan 6 bulan sekali.

Jadi dapat disimpulkan jenjang kaderisasi PKB belum memiliki jenjang kaderisasi yang jelas oleh narasumber, akan tetapi narasumber hanya menyebutkan organisasi sayap partai yang berada dibawah naungan PKB dengan 2 jenjang politik yakni sebagai politik praktis dan simpatisan. Sedangkan PKS dalam level jenjang kaderisasi dijelaskan secara runtut mulai dari tingkatan pemula sampai utama dan cukup jelas terdapat kurun waktu dari masing masing level kaderisasi.

Untuk mengetahui partai politik melakukan kaderisasi atau tidak ada 4 hal penting yang menunjang adanya kaderisasi yang ideal di partai politik yakni adanya kurikulum atau silabus kaderisasi, adanya divisi yang bertanggung jawab dalam penyelenggara kaderisasi partai, adanya rentang waktu dari masing masing level perjenjangan, dan output dari

rentang kaderisasi berupa capaian kapasitas yang didasar pada masing masing level kaderisasi³⁴.

Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Grobogan telah memiliki kriteria kaderisasi yang ideal dibuktikan dengan adanya kurikulum atau silabus kaderisasi yakni PKS mengacu pada 5 pilar bidang studi dengan penjelasan sebagai berikut³⁵:

- a) Keagamaan, fungsinya sebagai basic moral dan moderasi beragama (*wasathiyyah*) dalam Islam, agama-agama yang diakui di NKRI, memiliki pondasi moral, ketaatan sesuai dengan sila pertama ketuhanan yang maha esa, kader partai harus kokoh dan kader PKS harus memiliki basic keagamaan yang kuat sebagai tuntutan pondasi kebangsaan Indonesia yaitu Pancasila.
- b) Kebangsaan nasionalisme, Edukasi tentang politik dan demokrasi di Indonesia sebagai komponen bangsa Indonesia harus menguatkan nilai kebangsaan terkait 4 pilar kebangsaan yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinnika Tunggal Ika.
- c) Kemasyarakatan, mengenal kebhinnekaan Indonesia bagaimana masyarakat Indonesia salah satunya kader PKS memiliki nilai sosial, nilai kemasyarakatan dan nilai persatuan.
- d) Kepartaian, mengenal informasi tentang partai yakni kader harus aktif dipartai harus tau tujuan partai, bagaimana menjadi anggota partai, karena partai merupakan bagian dari sarana didalam berbangsa dan bernegara yang sah secara konstitusi.
- e) Kepemimpinan Dan Kewirausahaan
Kader partai PKS dituntut menjadi pribadi yang religious, sesuai dengan taat pada agamanya masing masing, menjadi pribadi yang cinta terhadap negeri, membela negara, mempunyai jiwa nasionalisme dalam kaderisasi partai. Para kader harus menjadi anggota yang berperan

³⁴ Syamsudin Haris dkk, *Panduan Rekrutmen & Kaderisasi Partai Politik Ideal Di Indonesia*, ed. by Bhakti Ikrar Nusa dan Nurhasim Moch, *Panduan Rekrutmen & Kaderisasi Partai Politik Ideal Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Keдеputian Pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi Bekerja sama dengan Pusat penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik LIPI), 2016). Hlm.51.

³⁵ Beni Kasharnowo, Selaku Ketua Bidang Divisi Kaderisasi DPD PKS Kabupaten Grobogan, Wawancara Dengan Penulis, Pada Hari Jumat, 04 Maret 2022, Pukul 14:17 WIB , Di Kediaman Mrisi, Tanggunharjo, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, Wawancara 5, Transkrip

sebagai masyarakat, anggota partai dan kader yang baik. Dari semua itu mereka disiapkan menjadi pemimpin dan wirausaha yang mandiri secara ekonomi, tidak bergantung pada orang lain.

Yang kedua adalah adanya divisi kaderisasi yang menangani dan bertanggung jawab dalam sistem pengkaderan PKS diketuai oleh Kasharnowo, SE sesuai dengan struktur kepengurusan dalam menangani bidangnya masing masing.

Ketiga, dari level jenjang kaderisasi PKS ada kurun waktu Jenjang pengkaderan yang telah dijelaskan diatas baik level pemula dan anggota siaga, anggota siaga tidak ada waktu karena telah mempunyai KTA dan mengikuti kegiatan rutin PKS. Siaga untuk menjadi muda ketika sudah masuk ke UPA dan pembinaan rutin otomatis menjadi anggota muda. Muda ke pratama ada kriteria waktu minimal satu tahun sesuai aturan AD/ART dan maksimal tidak ada, apabila ketika dalam penguasaan materi belum selesai ditempuh maka tidak bisa naik ke jenjang berikutnya dan juga jika kurang dalam mengikuti UPA hanya setengah tahun maka tidak bisa naik pratama, karena pratama ke madya butuh waktu 2 tahun, madya ke dewasa butuh waktu 3 tahun, madya ke dewasa menunggu 4 tahun.

Keempat output dari adanya Hasil yang didapat dari capaian kapasitas masing masing level perjenjangan mengacu pada indikator capaian 5 pilar partai PKS sesuai dengan bidang studi pokok masing masing, indikator tersebut menggunakan sistem SKS jika mau lulus harus sesuai dan memenuhi jumlah indikator capaian di PKS. Dari keseluruhan output yang didapat dalam sistem kaderisasi PKS wawasan mengenai politik dan pemerintahan mulai dari keagamaan, kebangsaan nasionalisme, kemasyarakatan, kepartaian, dan kepemimpinan dan kewirausahaan³⁶.

Sedangkan sistem kaderisasi PKB sesuai dengan informasi narasumber tidak disediakannya modul atau kurikulum dalam kaderisasi namun materi yang

³⁶ Beni Kasharnowo, Selaku Ketua Bidang Divisi Kaderisasi DPD PKS Kabupaten Grobogan, Wawancara Dengan Penulis, Pada Hari Jumat, 04 Maret 2022, Pukul 14:17 WIB , Di Kediaman Mrisi, Tanggunharjo, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, Wawancara 5, Transkrip

diberikan ketika adanya pembinaan seperti pengenalan materi politik rahmatan lil alamin, strategi management dan pengelolaan partai/ PKP PKB³⁷.

Sesuai dengan data struktur organisasi tidak adanya divisi yang menanggung jawabi pekathan dan pembinaan kaderisasi PKB, namun narasumber meberikan infomasi secara signifikan terdapat 2 divisi yang bertanggung jawab dalam kaderisasi, dan kepemiluan. Untuk menjadi pengurus partai seperti divisi kaderisasi dan kepemiluan.

Kemudian dalam kaderisasi PKB tidak ada rentang waktu dari seseorang yang baru dan cepat karir politiknya mereka yang bersungguh sungguh dalam kegiatan partai. Akan tetapi sebagian hanya menjadi simpatisan partai tidak mau naik karena konsekuensinya dalam menduduki jabatan membutuhkan mengeluarkan banyak biaya. Maka dari itu rentan waktu tidak dapat menjamin, seperti kader yang sudah lama di partai aktif dan juga kemauannya tinggi namun untuk berani melangkah ke jenjang serius tidak akan lepas dari biaya.

Outputnya dari adanya kaderisasi PKB, PKB hanya menyerukan untuk politik kehadiran disetiap acara apapun yang berada di wilayahnya sehubungan dengan pemerintahan baik diacara pilkades atau lainnya. Maka dari itu output dari masyarakat akan tahu bahwa PKB selalu hadir dan aktif dalam segala kegiatan sehingga masyarakat akan menilai dan menyorot PKB.

Jadi kesimpulannya bahwa kaderisasi PKB secara ideal belum melakukan kaderisasi karena sebagian masih ada indicator kaderisasi ideal dan aturan yang belum ada dalam sistem kaderisasi seperti tidak disebutkan seacara runtut kurikulum yang menunjang kaderisasi, setruktur kepengurusan partai yang belum secara jelas menyebutkan adanya divisi yang membidangi bidangnya masing masing, tdak adanya rentang waktu yang jelas dalam level perjenjangan kaderisasi sessuai dengan AD/ART partai. Sedangkan partai PKS dapat dikatakan sudah melakukan kaderisasi

³⁷ H Fathoni, S.Pd.I Selaku Ketua Bidang Divisi Kaderisasi DPC PKB Kabupaten Grobogan, Wawancara Dengan Penulis, Pada Hari Rabu, 02 Maret 2022, Pukul 14:02 WIB, Di Kantor DPC PKB Kabupaten Grobogan, Wawancara 3, Transkrip.

yang baku dan runtut dengan semua indicator kaderisasi yang ada.

Untuk menjawab alasan mengapa PKB jauh lebih unggul dalam hal rekrutmen dengan perolehan suara 24,441% sedangkan sistem kaderisasi PKS lebih terstruktur, namun dari PKS hanya memperoleh suara 11,771%. Karena rekrutmen politik tidak lepas dari sistem kaderisasi partai dimana keduanya sangat berkaitan erat ketika partai politik dalam merekrut kader kaderisasi dan rekrutmen ideal seharusnya bisa menghantarkan anggota atau pemimpinnya di lembaga legislatif. Namun secara langsung hasil dari penelitian berbeda dimana kaderisasi yang belum dan jauh dari kata ideal malah hanya bisa mendulang suara kecil. Hal ini dapat disimpulkan bahwasannya kaderisasi ideal tidak berpengaruh terhadap rekrutmen politik namun justru terlihat dari ideologi dan basis partainya terhadap masyarakat, empati dan kedekatan partai terhadap masyarakat dan tentunya terlihat dari letak geografis/ basis wilayah dari masyarakat yang sesuai dengan lingkungan sehari hari, seperti lingkup pedesaan, santri mereka masih kental dengan tradisi keagamaan dari para pendahulunya yang dianggap cocok dengan PKB yang kental dengan NU. Sedangkan PKS basisnya di wilayah perkotaan yang membaaur dengan orang orang yang berbeda agama dan pemikiran yang modern serta anggota ataupun kadernya dari para aktivis dakwah kampus dan kelompoknya banyak diminati oleh kaum muda. Sehingga bisa dikatakan rekrutmen dan kaderisasi yang ideal di tingkat lokal ialah dia yang mampu mendapatkan perolehan suara dan jabatan yang unggul dimasyarakat kabupaten Grobogan.